

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang diberbagai bidang. Pemerintah harus mampu mengupayakan pembangunan yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Selain menciptakan pembangunan fisik untuk masyarakat, pemerintah perlu mengupayakan pengembangan sumber daya manusia yang dapat mendukung proses pembangunan, antara lain: Dukungan dalam tata kelola dan desain, atau pembangunan yang teratur di Indonesia. Saat ini kota Mojokerto bergerak dalam berbagai kegiatan pembangunan seperti pasar, sumber daya manusia, dan kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya. Sebagai perubahan yang sinergis, pembangunan memerlukan perencanaan yang matang dan sistematis. Artinya, setiap perubahan memerlukan rencana yang telah disesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga mencapai hasil yang maksimal. Proses perencanaan pembangunan kota Mojokerto menuntut para pelaku pembangunan untuk terlibat, dilakukan secara visioner dan bertanggung jawab, serta tetap fokus pada penyelesaian masalah pembangunan di berbagai daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Hal tersebut sudah diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud penting dari pelaksanaan wewenang pemerintah daerah adalah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dapat menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya harus terencana dan bersinergi dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi.

Keberhasilan pembangunan daerah merupakan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEKO) yang merupakan unsur pendukung walikota yang dipimpin oleh walikota yang bertanggung jawab kepada walikota Mojokerto. BAPPEKO bertanggung jawab menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan perkotaan. Sebagai perencana, BAPPEKO harus mampu menyusun rencana pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, pengembang rencana pembangunan perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang pembangunan daerah, memanfaatkan potensi daerah secara maksimal. Sebagai perencana pembangunan daerah, BAPPEKO berkomitmen untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin dalam merencanakan dan mengelola pelaksanaan program pembangunan serta melalui mekanisme perencanaan yang melayani kepentingan masyarakat.

Penyusunan Perencanaan rencana pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2023 harus memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Kota Mojokerto dalam Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Provinsi Jawa Timur termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota yang terdiri dari Gresik–Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan. Dalam penetapan fungsi wilayah pembangunan (WP), Kota Mojokerto termasuk dalam WP Gerbangkertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Dalam rencana penetapan kawasan andalan, Kota Mojokerto masuk sebagai Kawasan dengan sektor unggulan perikanan, industri, dan pariwisata.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPDJM) Ketercapaian rencana dan incaran yang dimaksud dapat terlihat dari parameter kinerja Renstra BAPPEKO Kota Mojokerto. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto. Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti di Bappeko Kota Mojokerto, serta berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Kota

2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya di bidang perencanaan
4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Badan Perencanaan Pembangunan Kota secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam
6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota
7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
8. Kurang optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM
9. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota lain
10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan
12. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota

Mojokerto belum tersedia secara optimal.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Bappeko tersebut diatas, maka Bappeko melakukan evaluasi dan memperbaiki permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja Bappeko dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara maksimal.

Bappeko melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan rancangan RKPD. Tahap berikutnya adalah musrenbang RKPD, yaitu forum para pemangku kepentingan/ stakeholders dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. SPPN menghendaki bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan. Dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, disebutkan bahwa secara umum terdapat kenaikan terhadap nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Mojokerto telah menunjukkan dokumen terkait kinerja, yaitu RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja. Namun secara kualitas, baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil sesuai dengan isu strategis yang ada serta perlu menjaga keselarasan kinerja antar dokumen yang ada. Tematik Pembangunan Kota Mojokerto yang dituangkan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam penentuan program/ kegiatan prioritas, begitupun juga dengan kebijakan umum penganggaraannya.

Perencanaan dan penganggaran yang terpadu merupakan syarat utama untuk menjamin terlaksananya program/kegiatan pembangunan agar sesuai dengan apa yang direncanakan dalam perencanaan pembangunan. Apabila perencanaan dan penganggaran ini tidak konsisten, maka kemungkinan yang terjadi ialah apa yang direncanakan berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan daerah ditentukan oleh alokasi pendanaan untuk membiayai program/kegiatan. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Ilmu Perencanaan Pembangunan bahwa

keterpaduan antara “*Planning, Programming and Budgeting*” menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto.

Di dalam pelaksanaan pembangunan yang merata mengharuskan adanya integrasi linear antara tema pembangunan pusat, regional dan daerah. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 menekankan pada pembangunan Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Rancangan RKPD Kota Mojokerto tahun 2023 tentunya harus memiliki linearitas tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada Arah pembangunan Jawa Timur yang diadopsi dan disesuaikan dengan Tema Kepala Daerah. Arah pembangunan kota Mojokerto pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik domestik maupun regional.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 pemerintah Kota Mojokerto mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah selaras dengan arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat. Visi RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025 yakni : “Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”. Target utama dari visi pembangunan tersebut mewujudkan kota Mojokerto sebagai kota yang maju, unggul dan mandiri secara ekonomi sehingga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih serta asri lingkungannya dengan tetap melestarikan sosial budaya sebagai kearifan lokal.

Kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan utama yang diharapkan terus membaik yang tercermin dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang bermutu serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai berkembangnya budaya produktif dan mandiri, berdaya saing tinggi, memiliki karakter kuat yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebijakan lama namun terbuka dengan kemajuan zaman. Bersamaan dengan perkembangan di atas, peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemuka masyarakat, dan partai politik dalam proses pembangunan juga diharapkan meningkat. Birokrasi pemerintahan dalam fase ini diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator bagi berbagai pertumbuhan ekonomi dan sosial di masyarakat, karena tingkat perkembangan ekonomi dan sosial yang ada telah mapan dan terlembaga.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah

**Tabel 1.1 Permasalahan, Faktor Penghambat & Faktor Pendukung Bappeko**

Visi : "Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat			
a	Program Pelayanan Kesehatan yang terjangkau, terutama penyediaan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh warga kota Mojokerto	Belum memiliki SPM bidang kesehatan	Lamanya proses pembahsan SPM	Adanya ketentuan dari Mendagri tentang SPM
b	Program Pendidikan gratis dan Berkualitas untuk warga kota Mojokerto	Belum memiliki SPM bidang Pendidikan	Keterbatasan Anggaran	Tersedianya teknologi dan sumber daya
c	Program Perluasan Kesempatan Kerja dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat interpreneurship bagi angkatan kerja.	Kurang optimalnya kegiatan promosi investa sehingga kesempatan kerja terbatas	Belum memiliki dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota	Berkembangnya sekolah kejuruan yang menekankan keterampilan praktis
d	Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin terutama ke cukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan	Belum dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Dasar	Keterbatasan Anggaran	Masyarakat semakin menuntut peningkatan pelayanan dasar
2	Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi			
a	Program Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.	Belum memiliki indikator mutu pelayanan publik	Kendala SDM dan Anggaran	Masyarakat semakin menuntut peningkatan pelayanan dasar
b	Program Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, Ruang Pamer Ruang Pertemuan, dan lain sebagainya.	Belum memiliki indikator mutu pelayanan public	Kendala SDM dan Anggaran	Masyarakat semakin menuntut peningkatan pelayanan dasar

c	Program Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement)	Belum memiliki indikator mutu pelayanan public	Kendala SDM dan Anggaran	Masyarakat semakin menuntut peningkatan pelayanan dasar
d	Program Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan	Belum memiliki konsep reformasi birokrasi yang komprehensif	Penempatan SDM tidak sesuai kompetensinya	Masyarakat semakin menuntut peningkatan pelayanan dasar
3	Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai			
a	Program peningkatan dan pengembangan infrastruktur tersebut meliputi sarana-prasarana: jalan dan jembatan; perumahan; lingkungan, perekonomian; kesehatan; pendidikan; sosial dan budaya; air bersih; ketahanan pangan; berfungsinya ruang terbuka hijau dan peribadatan	Belum memiliki RDTR	Lamanya proses penyusunan RDTR	Perkembangan teknologi dan informasi
4	Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Tenram			
a	Program Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tenram dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing	Terjadi penurunan daya dukung lingkungan	Kurangnya kesadaran stakeholder akan pentingnya kelestarian lingkungan	Tingginya komitmen Pemerintah Kota Mojokerto terhadap lingkungan

Sumber : hasil analisis peneliti

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan kinerja Bappeko dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah kota Mojokerto di Kota Mojokerto tahun 2023?
2. Bagaimana langkah strategis Bappeko dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto tahun 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Bappeko dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto tahun 2023
2. Untuk mengetahui langkah strategis Bappeko dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto tahun 2023

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan sebagai usulan-usulan perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap peneliti selanjutnya mengenai perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto

## **1.5 Definisi Konseptual**

Istilah kinerja secara mentah dapat diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dalam arti ini kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan

untuk menilai prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu. Beberapa pendapat mengenai kinerja juga dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Widodo (2006:78), kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dalam menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi, organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006:25). Mangkunegara (2002:67) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI (1999:3) merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja dikemukakan LAN RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah potensi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

### **1.5.1 Perencanaan Pembangunan**

Kinerja Bappeko dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek. Baappeda Kota Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah telah menyusun program sebagai pedoman dan rujukan perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian

sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

### **1.5.2 Pembangunan Daerah**

Kinerja Bappeko kota Mojokerto dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan mendasar dalam peraturan UU No 25 Tahun 2009, yaitu dengan adanya pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri merupakan rangkaian suatu acara meningkatkan pelayanan masyarakat bagi setiap warga negara, penduduk atas barang atau jasa administrasi dan layanan masyarakat yang diberikan oleh penyedia layanan publik sesuai dengan UU. Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdayas umberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Salah satu tugas strategis yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dengan adanya perencanaan melihat daerah yang memiliki potensi sumber daya dan dapat mempertimbangkannya. Hasil yang berhasil dilihat dari adanya perencanaan yang baik dengan dilakukan berdasarkan pada data yang akurat dan informasi yang valid dan akuntabel.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional dievaluasi secara nasional, dimana konsepnya harus direalisasikan dengan cara mengubah variabel menjadi sesuatu yang bernilai. Penjelasan definisi operasional dibagi dengan variabel dalam penelitian dibawah ini:

### **1.6.1 Perencanaan Pembangunan**

Definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan di atas, maka pengertian perencanaan pembangunan dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Pemilihan alternatif yang paling baik diharapkan mampu mencapai suatu tujuan yang berguna bagi kualitas pembangunan kedepannya.

### **1.6.2 Pembangunan Daerah**

Pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan norma-norma tertentu. mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam yaitu:

- a. Siagian (2005:4) bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah maju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

- b. Todaro 1998 (Dalam Listi Yaningsih 2014) mengatakan pembangunan adalah proses multimensi yang mencakup perubahan- perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) pemberantasan kemiskinan absolute.
- c. Todora Smith (2006:28) Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya keras, sebisa mungkin dalam melalui serangkaian kombinasi proses social, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Berdasarkan definisi di atas, pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dilakukan oleh atau untuk sekelompok orang tertentu, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah perjalanan yang dinamis, dimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membuat pilihan-pilihan strategis yang mendasar demi mencapai kemajuan yang diinginkan. Selain itu, keberhasilan pembangunan juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan akan membawa manfaat jangka panjang, baik dalam peningkatan kualitas hidup maupun dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis dan fokus penelitian ini adalah memberikan data melalui tulisan yang

bersumber dari narasumber. Penelitian ini akan menggambarkan tentang kinerja Bappeko Kota Mojokerto dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto.

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeko), beralamat di Jl. Jawa No.31, Mergelo, Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61321.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, mulai dari 17 Juli 2023 sampai tanggal 3 November 2023. Proses yang terdiri dari penyajian pengolahan data dalam bentuk laporan magang riset pemerintahan dan proses bimbingan berlangsung.

#### **c. Sumber Data**

Untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeko) dalam perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dan mengetahui langkah strategis Bappeko dalam mengoptimalkan kinerjanya, terdapat dua jenis data yang digunakan peneliti, yaitu:

##### **1) Data Primer**

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Badan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewirausahaan dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeko Litbang Kota Mojokerto.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini terdiri dari peraturan-peraturan, bahan-bahan pendukung penelitian, dan sumber lainnya.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap yang yaitu :

### a) Wawancara

Wawancara mendalam terstruktur dengan Wawancara dilakukan dengan cara terfokus dengan lebih awal menyiapkan bahan pertanyaan yang bersifat terstruktur, dan mendalam dengan Kepala Badan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewirausahaan dan Kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeko Litbang Kota Mojokerto.

### b) Observasi

Dalam melakukan observasi yang digunakan untuk penelitian yang sudah direncanakan secara sistematis. Tujuan untuk menggunakan metode ini untuk meninjau langsung tempat penelitian dan melihat bagaimana proses kinerja Bappeko Kota Mojokerto dalam proses perencanaan Pembangunan daerah.

### c) Dokumentasi

Mengambil data tentang hal-hal seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, rapat, agenda, dan lainnya adalah definisi dokumentasi menurut Aarikunto. Penjelasan menunjukkan bahwa peneliti menggunakan teknik ini sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bahan yang tertulis, termasuk dokumen resmi. Peneliti membuat dokumentasi tentang hal-hal yang membantu penelitian.

## **1.8 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memilih subjek penelitian yaitu :

1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewirausahaan
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeko Litbang Kota Mojokerto

## **1.9 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menemukan tujuan dengan pendekatan studi kasus yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait kinerja Bappeko dalam perencanaan pembangunan Kota Mojokerto.
2. Mereduksi data dengan memilih dan menyederhanakan data-data yang ada dan yang penting dengan memfokuskan pada hal-hal yang pokok, hasil wawancara terhadap informan penelitian kemudian dijadikan transkrip wawancara, sedangkan dokumentasi dipilih yang terkait langsung permasalahan yang akan diteliti.
3. Penyajian data dengan menyusun data berupa teks naratif dan bagan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menarik sebuah kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap penarikan

kesimpulan terhadap semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan reduksi data, menyajikan dan melakukan verifikasi data. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi, yang diintegrasikan dengan kajian teori, dan penelitian terdahulu yang relevan.

### 1.10 Jadwal Penelitian

Tabel di bawah ini menunjukkan jadwal kegiatan penelitian yang akan berlangsung selama empat bulan:

**Tabel 1.2 Jadwal Penelitian**

Tahapan	Jenis Kegiatan	Waktu Bulan			
		ke-			
		1	2	3	4
Persiapan	Mengembangkan ide untuk pelaksanaan				
	Menyusun alat				
	Seminar proposal				
Pelaksanaan	Magang riset				
	Mengambil data				
	Mengolah informasi penelitian				
Pelaporan	Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis				
	Menyusun laporan dengan cara yang sesuai dengan prosedur penulisan magang riset				
	Sidang skripsi				